Pelaksanaan Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kepolisian Sektor Tapung

Masri

^a Kepolisian Sektor Tapung, Petapahan Kabupaten Kampar-Riau Indonesia, Email: masripetapahan@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 13-08-2020

Revised : 20-09-2020

Accepted : 10-10-2020

Published : 28-11-2020

Keywords:

Security

Order

Police

Abstract

The problem examined in this research is how is the implementation of Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 3 of 2015 concerning Community Policing on the main duties and functions and authority of Bhayangkara Community Security and Order in the Tapung Sector Police. This research method is carried out directly in the field according to the type of sociological legal research. The results showed that the implementation of regulations on Community Policing against the Tupoksi and the authority of Bhabinkamtibmas in the Tapung Sector Police has not achieved maximum results. Factors that hinder the implementation of regulations concerning Community Policing of the Tupoksi and the authority of Bhabinkamtibmas in the Tapung Sector Police are: applicable law, law enforcement officials, supporting facilities or facilities, community and cultural factors. Efforts taken are in the form of preventive and repressive measures.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 13-08-2020

Direvisi : 20-09-2020

Disetujui : 10-10-2020

Diterbitkan : 28-11-2020

Kata Kunci:

Keamanan

Ketertiban

Polisi

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta wewenang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kepolisian Sektor Tapung. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan regulasi tentang Pemolisian Masyarakat terhadap Tupoksi serta wewenang Bhabinkamtibmas di Kepolisian Sektor Tapung belum mencapai hasil yang maksimal. Faktor yang menghambat pelaksanaan regulasi tentang Pemolisian Masyarakat terhadap Tupoksi serta wewenang Bhabinkamtibmas di Kepolisian Sektor Tapung adalah berupa: hukum yang berlaku, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat dan faktor kebudayaan. Upaya yang dilakukan adalah berupa tindakan preventif dan represif.

PENDAHULUAN

Batang tubuh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum tertinggi di Indonesia, dengan lugas menyatakan bahwa

seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban dalam mempertahankan keamanan negara. Dimana hal tersebut dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama dan kapasitas masyarakat di dalamnya adalah sebagai pendukung. Polri yang berawal dari pihak masyarakat kini menjadi berada pada pihak negara yang berperan untuk menghadapi dan mengontrol masyarakat itu sendiri.¹

Sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan keamanan negara, perubahan paradigma kebijakan Hukum Tata Negara di Indonesia tahun 2002 telah memisahkan kelembagaan antara TNI dan Polri. Tugas dan fungsinya TNI adalah sebagai alat pertahanan negara yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan tugas pemeliharaan keamanan dalam negeri dilakukan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Manusia.²

Dalam kehidupan bermasyarakat, keadaan lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan tertib merupakan lingkungan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya dukungan dan kesadaran dari masing-masing anggota masyarakat dengan cara mematuhi pertauran yang berlaku, dan melakukan usaha-usaha maupun kegiatankegiatan sosial dalam bermasyarakat agar keamanan dan ketertiban dalam lingkungan tersebut dapat terjamin. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) maupun keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Akan tetapi usaha tersebut kini kurang diminati oleh masyarakat, karena mereka menanggapi bahwa usaha tersebut pada era saat ini dianggap sulit untuk diterapkan di dalam masyarakat.³

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah suatu usaha yang seharusnya diciptakan guna terpeliharanya kelangsungan kewibawaan pemerintah yang berkaitan erat dengan ketahanan nasional terlebih lagi negara saat ini dalam proses

¹ Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian, Surabaya : Laksbang Mediatama, hal. 21

² Humas Polri, Tugas dan Fungsi Polri (Online), <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.

³ Ridwan Setiawan Daradjat, Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Oleh Polisi Resort Kota Dalam Membentuk Sikap Masyarakat, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 3, No.2, Desember 2015, hal. 155

pembangunan, sehingga terciptanya kamtibmas yang mantap adalah salah satu unsur penting yang harus diciptakan demi berhasilnya pembangunan.⁴

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana urgensi dari pertahanan keamanan dalam negeri tersebut merupakan syarat utama yang mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polri tersebut, Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) atau biasa disebut Polmas berada dibawah unit Pembinaan Masyarakat (Binmas), merupakan *Grand Strategi* Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat.

Community policing juga dijadikan dasar pada usaha bersama antara masyarakat dengan kepolisian dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam masyarakat setempat yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dalam meningkatkan keamanan dan kualitas hidupnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam *community policing* bimbingan dan pendidikan masyarakat tanpa paksaan baik melalui perorangan atau kelompok untuk menumbuh kembangkan kemampuannya dalam menciptakan dan menjaga keamanan di lingkungannya.⁵

Dimana nilai-nilai yang terkandung dalam Polmas pada hakikatnya telah diimplementasikan Polri berdasarkan konsep Sistem Keamanan Swakarsa dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui program fungsi Bimmas yang sesuai dengan kondisi di Indonesia baik di masa lalu maupun di Era Reformasi (demokrasi dan perlindungan HAM). Terdapat 4 (empat) komponen diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan dapat bekerjasama, sehingga menghasilkan suatu keterpaduan yang dikenal dengan *criminal justice system*.⁶

Perumusan pedoman dasar strategi dan implementasi Polmas yang mencakup berbagai model Polmas yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan karakteristik dan kondisi masyarakat setempat. Oleh sebab itu, pada tingkatan paling dasar dalam mengemban tugas Polmas tersebut yaitu tingkat desa/kelurahan dibentuklah

⁴ I Nyoman Nuurjaya S.H., *Antara Polisi, Masyarakat Dan Pembinaan Kamtibmas*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Volume 12, No.3, Mei 1982, hal. 247

⁵ ICPCS, *Community Policing Kamtibmas Online*, nbhb nmymy

⁶ Pramono Mulyono, *Materi Kuliah Praktek Latihan Kemahiran Hukum Pidana* (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2008), 2.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Pada tingkat desa/kelurahan Polmas dilaksanakan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang berbunyi: “*Polmas dilaksanakan oleh Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas*” demi terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu Kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tentram.

Dimana Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan wewenangnya diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Bhabinkamtibmas ini ditunjuk berdasar kemampuan khusus yang dimilikinya. Bhabinkamtibmas merupakan Polmas Model C, berupa pengembangan konsep Polmas dari negara Jepang (*Koban* dan *Chuzaiso*), Australia, New Zealand, dan Inggris (*Neighbourhood Watch*) di Indonesia.

Di Jepang, asal usul model Polmas atau lebih dikenal dengan *koban* mulai dikembangkan sejak Meiji, sekitar 110 tahun lalu, kemitraan dengan masyarakat dirasakan lebih efektif untuk mencegah dan menindak kejahatan.⁷ Unit Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Sektor Tapung merupakan instansi yang berwenang menunjuk Bhabinkamtibmas yang akan ditempatkan di seluruh desa yang merupakan wilayah hukum Kecamatan Tapung yang secara keseluruhan terdiri dari 25 (dua puluh lima) Desa, dimana kemudian Bhabinkamtibmas tersebut diangkat berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Resor Kampar. Dalam mewujudkan Tapung sebagai Kecamatan yang aman dan tertib maka Bhabinkamtibmas sesuai regulasinya menggandeng perangkat desa, *stake holder* dan tokoh – tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM).

Sesuai dengan peran Polri yang langsung berhubungan dengan masyarakat, Polri dianggap harus mampu bekerjasama dengan masyarakat guna menjaga ketertiban, ketentraman, dan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut karena masyarakat juga mengharapkan norma tersebut dapat dipatuhi. Namun tidak semua

⁷ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian, Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 70.

masyarakat paham dan mau mematuhi norma yang mereka kehendaki sendiri, sehingga untuk itulah kedudukan Polri sebagai pelaku penegak.⁸

Sinergitas antara mereka dengan Bhabinkamtibmas belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan tupoksi dan wewenang Bhabinkamtibmas di Polsek Tapung. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tingginya angka atas kasus – kasus perbuatan melawan hukum di Kecamatan Tapung, terutama di Desa Petapahan jika dibanding dengan kecamatan – kecamatan lainnya dalam wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Kampar. Ditambah lagi dengan adanya berbagai fenomena pengulangan perbuatan melawan hukum yang sebelumnya sudah dibantu oleh Bhabinkamtibmas yang berada dalam unit Binmas Polsek Tapung sesuai dengan penunjukannya dalam bentuk konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi dan motivasi sehingga tercapai pemecahan permasalahan. Pengulangan tersebut terjadi pada beberapa bentuk perbuatan melawan hukum tertentu, baik dengan pelaku yang sama dengan bentuk perbuatan melawan hukum yang berbeda atau oleh pelaku yang berbeda dengan bentuk perbuatan melawan hukum yang sama. Atau dengan kata lain tingkat efektifitas hukum dalam masyarakat masih rendah.

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian negara, yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Institusi kepolisian juga terikat pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan tanggung jawab kepada hukum.⁹

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA WEWENANG BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KEPOLISIAN SEKTOR TAPUNG

Polsek Tapung sebagai sebuah institusi negara dalam penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), memang bukanlah suatu hal yang tidak mudah. Karena pada dasarnya keberhasilan penyelenggaraan Kamtibmas yang dimaksud tidak akan dapat terwujud tanpa sinergitas dari beberapa instansi terkait dan masyarakat. Dalam

⁸ I Nyoman Nuurjaya S.H., Antara Polisi, Masyarakat Dan Pembinaan Kamtibmas, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Volume 12, No.3, Mei 1982, hal. 247.

⁹ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, (Jakarta: Refika Aditama, 2009), 116-117.

masyarakat sendiri telah dibentuk lembaga – lembaga masyarakat dalam upaya mewujudkan Kamtibmas di Kecamatan Tapung.

Melalui *Community Policing* sebagai gaya pemolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas upaya perwujudan Kamtibmas di wilayah hukum Kecamatan Tapung. Peran masyarakat pada strategi pemolisian masyarakat (Polmas) ini sudah jelas akan melibatkan masyarakat bersama lembaga - lembaga swadaya masyarakat yang ada untuk membantu polisi mengemban fungsi Polmas tersebut.

Pengertian Kamtibmas sebagaimana disebutkan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupan. Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan bathin. Hak-hak tersebut adalah hak alami manusia berdasarkan hukum alam. Oleh karena manusia mempunyai hak yang dikenal sebagai bayangan hidup dari Tuhan, maka setiap individu mempunyai hak untuk berdaulat, hak untuk berada, hak untuk berfungsi dan hak untuk dilindungi.¹⁰

Lembaga – lembaga Swadaya Masyarakat beserta tokoh – tokoh masyarakat setempat yang kemudian disebut sebagai Pilar Polmas sangat penting keberadaannya di wilayah hukum Kecamatan Tapung ini. Pilar Polmas yang dimaksud berada di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Pilar Polmas di tingkat desa antara lain adalah: pimpinan muspika, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan media masa, cendekiawan/civitas akademik, pimpinan LSM/Ormas, pimpinan organisasi pemuda dan pimpinan organisasi perempuan. Sedangkan Pilar Polmas di tingkat kecamatan antara lain terdiri dari: kepala desa, Lembaga Musyawarah Desa (LMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan media masa, cendekiawan/civitas akademik, pimpinan LSM/Ormas, pimpinan organisasi pemuda dan pimpinan organisasi perempuan. Pilar – pilar Polmas pada hakikatnya mempunyai tugas yang mulia yaitu membantu Polsek Tapung pada umumnya dan Unit Pembinaan Masyarakat (Binmas) yang ditaja oleh Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam rangka usaha mewujudkan Kamtibmas di wilayah hukum Kecamatan Tapung.

¹⁰ LaRouche, *Apakah Demokrasi itu ?- Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin*, terj.Sesko TNI, (Washington DC: EIR News Service, Inc,1994), 242.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Tapung belum mendeskripsikan sebuah keadaan yang aman dan tertib. Pada kondisi seperti inilah dapat ditarik kesimpulan bahwa petugas Bhabinkamtibmas belum dapat menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sesuai dengan Pasal 26 sampai Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas). Dimana masih banyak perbuatan – perbuatan melanggar keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh masyarakat Tapung seperti pencurian, kecelakaan lalu lintas, perkelahian bahkan KDRT.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perbuatan melanggar keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bentuk dari perbuatan melawan hukum yang telah mereka lakukan berdampak pada kerugian orang lain, apalagi jika perbuatan tersebut mereka ulangi, padahal mereka sudah tahu dengan pasti apa konsekuensi hukum yang akan mereka tanggung apabila melakukan perbuatan – perbuatan yang tidak dibenarkan oleh norma masyarakat, nilai – nilai luhur Pancasila dan peraturan perundang – undangan. Dimana konsekuensi hukum yang dimaksud tidak hanya berbentuk sanksi, denda, hukuman kurungan bahkan sanksi sosial yaitu dikucilkan dalam pergaulan. kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan Kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu akan semakin kuat kesadaran hukum dan semakin kabur kewibawaan Kepolisian, akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat.¹¹

Kesimpulan tersebut dapat diambil dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan disertai dengan data-data pendukung. Untuk lebih jelasnya kondisi Kamtibmas yang dimaksud dapat dilihat dari data pendukung berupa Tabel dan Grafik Perbuatan Melawan Hukum di Kecamatan Tapung Tahun 2019 berikut ini:

¹¹ Tabah, *Polisi Budaya Dan Politik*, (Semarang: CV Sahabat, 1996), 2.

Tabel I
Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek
Tapung Tahun 2019

NO	DESA	Pencurian	Lakalantas	Perkelahian	KDRT	Jumlah Kasus
1.	Petapahan	3	1	2	1	7
2.	Pantai Cermin		1			1
3.	Petapahan Jaya					0
4.	Sumber Makmur	1				1
5.	Indra Sakti		1	2		3
6.	Tri Manunggal					0
7.	Muktisari				1	1
8.	Gading Sari		1			1
9.	Pancuran Gading				1	1
10.	Sari Galuh				1	1
11.	Sei Putih	1				1
12.	Pelambaian		1			1
13.	Tanjung Sawit	1	2			3
14.	Pagaruyung			1		1
15.	Indra Puri		1	2	1	4
16.	Kinantan	1				1
17.	Sibuak				1	1
18.	Air Terbit				1	1
19.	Muara Baru			1		1
20.	Sei Lambu Makmur			2		2
21.	Sei Agung				1	1
22.	Karya Indah		2			2
23.	Kijang Rejo	1				1
24.	Bencah Kelubi				1	1
25.	Batu Gajah				1	1

Data Olahan Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat perbuatan melawan hukum di Kecamatan Tapung, khususnya di Desa Petapahan menunjukkan angka yang lumayan tinggi. Padahal jika ditinjau secara geografis dan demografisnya, wilayah ini bukanlah wilayah perkotaan yang dengan segala dinamikanya sebagai pengaruh dari struktur sosial yang dapat menumbuhkan angka kriminalitas yang tinggi. Walaupun dalam sebuah kajian ilmu kriminologi dikatakan bahwa:

“Kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat.”¹²

BENTUK-BENTUK PELANGGARAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA PENYELESAIANNYA DI WILAYAH HUKUM POLSEK TAPUNG

Untuk mengetahui lebih jelas bentuk – bentuk perbuatan pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tapung, maka penulis melakukan observasi langsung lapangan ditambah dengan hasil wawancara dengan beberapa petugas Bhabinkamtibmas Polsek Tapung. Sesuai dengan kewenangannya untuk menangani permasalahan Kamtibmas pada tingkat dasar yang mengganggu keamanan dan ketertiban warga dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat (*alternative dispute resolution*) yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama.

Peran dan fungsi Polisi mungkin secara hakiki tidak berubah, tetapi dalam sejarah Kepolisian kita lihat, bahwa Polisi masih harus mewujudkan peran dan fungsi tersebut. Maka barangkali dapat dikatakan, bahwa yang berubah dari waktu ke waktu adalah tipe atau model dan gaya Perpolisian.¹³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Tapung, bentuk – bentuk pelanggaran keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tapung sebagian besar dapat dikategorikan juga sebagai perkara pidana dan/atau Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Polri telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bhabinkamtibmas dalam kasus pidana yang dihadapi, yaitu antara lain:¹⁴

- a. Menerima dan mencatat laporan / pengaduan.
- b. Mendatangi dan mengamankan TKP.
- c. Melaporkan kejadian kepada pimpinan (melalui alat komunikasi).
- d. Melakukan TKP, dengan tujuan:
 - 1) Menjaga *staus quo* (keutuhan dan keaslian TKP)
 - 2) Menolong korban
 - 3) Memasang Police line

¹² Dwijaya Priyatno, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 60.

¹³ Anton Tabah, *Reformasi Kepolisian (Pakar menjawab: Polri harus otonom dan terpisah dari ABRI)*. (Semarang: CV Sahabat, 1998), 19-20.

¹⁴ Subdit Binpolmas Baharkam Polri, *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*, (Jakarta: Ditbinmas Baharkam Polri, 2014), 13.

- 4) Mengamankan tersangka dan barang bukti
- e. Menyerahkan TKP kepada petugas di TKP
- f. Membantu melancarkan proses penyidikan (menggerakkan saksi/tersangka untuk memenuhi panggilan secara patut).

Sebagian dari tatanan kehidupan masyarakat adalah hukum, dalam kehidupan dan peradapan modern, hukum bahkan jauh mengungguli bentukbentuk manifestasi tatanan yang lain. Oleh karena itu ketajaman dan kejelasan serta kemampuannya untuk memaksa dipatuhi, maka hukum merupakan bentuk tatanan masyarakat *par excellence*. Disebabkan bentuknya yang sangat tajam dan penetratif, maka sejak itu muncullah pembaharuan hukum dengan segala pembaharuan hukum yang didasarkan pada suatu revolusi secara diam-diam di dunia, dan sejak saat itu dunia terbelah menjadi dua secara tajam, yakni dunia hukum dan dunia sosial.¹⁵

Berdasarkan observasi langsung penulis dan disertai wawancara dengan petugas Bhabinkamtibmas Polsek Tapung, maka kasus – kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban yang sering petugas Bhabinkamtibmas tangani di wilayah hukum Kecamatan Tapung adalah :

a. Pencurian

Perbuatan pidana dalam bentuk pencurian dalam wilayah hukum Polsek Tapung sering terjadi di Desa Petapahan. Informasi ini penulis dapat secara langsung melalui wawancara terstruktur dengan beberapa sumber data primer.

Pencurian yang sering terjadi sebagai bentuk Tipiring biasanya adalah pencurian brondolan sawit yang jatuh ditanah oleh masyarakat di lahan perkebunan – perkebunan sawit yang dikelola oleh perusahaan.¹⁶

Hal yang senada juga diungkapkan secara bergantian oleh dua orang sumber yang lain dimana pada saat kejadian yang bersangkutan menjadi mediator antara para pelaku dan perwakilan dari pihak perusahaan perkebunan sawit korban pencurian untuk menyelesaikan perkara tersebut sesuai kewenangannya sebagai petugas Bhabinkamtibmas di wilayah desa tersebut.

Sebagai contoh adalah pencurian brondolan sawit yang dilakukan oleh dua orang anak bernama Devit Indra Pratama yang berumur 14 tahun dan Purwanto yang

¹⁵ Sarcipto Raharjo. 10 Februari 1998. *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. Makalah disajikan dalam symposium nasional ilmu hukum “*Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia*”, disampaikan dalam rangka disnatis fakultas hukum Undip Semarang

¹⁶ Hasil wawancara dengan Said Aidil Umar, SE, Kepala Desa Tapung, pada tanggal 12 September 2019.

berumur 14 tahun. Pencurian dilakukan di kebun sawit yang berada di Blok I Nomor 15/16 yang dikelola oleh PT. RRME pada tanggal 22 April 2019.¹⁷

Keterangan tersebut dipertegas oleh pernyataan rekan sejawat sumber yang menerangkan bahwa:

Kronologis pencurian tersebut, awalnya pencurian sawit tersebut diketahui oleh petugas keamanan PT. RRME yang bernama Riston. Kemudian Riston menangkap kedua anak tersebut dan mengamankannya ke posko sekuriti PT. RRME. Setelah dilakukan assesmen oleh Riston dan Kanitpam PT. RRME yang bernama Purwanto, diketahuilah identitas kedua orang tua mereka. Pencurian juga dilaporkan oleh pihak PT. RRME kepada petugas Bhabinkamtibmas setempat dan tidak berselang lama petugas Bhabinkamtibmas datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersama dengan petugas reskrim dan intelkam Polsek Petapahan.¹⁸

Setibanya di TKP pihak Bhabonkambibmas Polsek Tapung beserta petigas reskrim dan intelkam setempat juga mencoba menghubungi perwakilan LMD dan forum pemuda, tetapi sayangnya perwakilan dari pengurus LMD dan forum pemuda setempat tidak dapat datang ke TKP walaupun sudah dihubungi oleh petugas Bhabinkamtibmas. Dihari itu juga pihak PT. RRME memanggil orang tua anak – anak pelaku pencurian brondolan sawit tersebut.

Dari hasil perundingan antara orang tua Ilham yang bernama Andi beserta orang tua Devit yang bernama Erik Strada dengan Purwanto selaku pihak ke dua mewakili PT. RRME dan berdasarkan saran dari Bhabinkamtibmas setempat, maka atas pencurian brondolan sawit yang ditaksir senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut disepakati adanya perjanjian dengan syarat – sayarat yang telah dituangkan dan disepakati pada perjanjian dalam bentuk perjanjian tertulis. Dimana isi perjanjian tertulis yang dimaksud antara lain adalah:

- 1) Kesepakatan membuat perjanjian perdamaian dan saling memaafkan bagi para pihak.
- 2) Bahwa pihak pertama berjanji tidak akan masuk ke area PT. RRME dan melakukan pencurian brondolan sawit yang jatuh ditanah lagi. Apabila pihak pertama mengulangi perbuatannya maka bersedia ditindak berdasarkan hukum yang berlaku.
- 3) Kedua belah pihak sepakat bahwa setelah perjanjian perdamaian ditandatangani tidak akan melanjutkan perkara ini lagi dan saling menuntut baik secara pidana maupun perdata.

¹⁷ Hasil wawancara dengan M. Syafi'i, Anggota Bhabinkamtibmas Desa Petapahan pada Wilayah Hukum Polsek Tapung , pada tanggal 13 September 2019.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Agung Natalia, Anggota Bhabinkamtibmas Desa Petapahan pada Wilayah Hukum Polsek Tapung pada tanggal 13 September 2019.

- 4) Kedua belah pihak telah sepakat tidak akan melanjutkan perkara ini melalui jalur litigasi (pengadilan)
- 5) Apabila kedua belah pihak dan atau salah satu pihak tidak mentaati isi perjanjian perdamaian yang telah dibuat, maka kedua belah pihak dan atau salah satu pihak bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

b. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Berbeda desa, berbeda juga jenis PMH yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tapung. Desa Tanjung Sawit merupakan desa dengan angka Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) yang lumayan tinggi. Berdasarkan dari obeservasi langsung dan wawancara secara terstruktur, beberapa sumber data primer menyatakan bahwa sepanjang tahun 2019 ada dua kali kejadian Laka Lantas di desa ini yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tindak pidana, apalagi jika sampai menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kepala Desa setempat yang pada saat Laka Lantas terjadi yang bersangkutan berada di TKP Laka Lantas, maka melalui wawancara dengan penulis beliau menyatakan bahwa:

Pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan Laka Lantas dewasa ini sering terjadi di Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung. Sebagai contoh adalah sebuah Laka Lantas yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 2019, dimana ada seorang pengendara mobil bernama Heru, melanggar rambu – rambu lalu lintas. dikarenakan terburu – buru ingin segera tiba di rumah sakit untuk menemani istrinya yang sedang menjalani proses persalinan di rumah sakit. Pada persimpangan jalan terdapat rambu lalu lintas yang disebut lampu apil dan saat itu lampu apil berwarna merah. Karena terburu – buru Heru (36 tahun) melanggar rambu tersebut dan nekat melaju lurus menerobos lampu apil yang berwarna merah. Tanpa disengaja mobil yang dikendarai Heru menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Martinah (25 tahun), hingga menyebabkan Martinah tersungkur jatuh ke aspal.¹⁹

Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut martinah menderita luka ringan yaitu lecet di bagian kaki kiri, namun motor martinah rusak bagian lampu belakang dan patah kaca spion sebelah kiri. Kerugian yang diderita martinah saat itu sekitar Rp. 1.500. 000 (satu juta lima ratus rupiah). Untung saja Heru menghentikan kendaraannya dan menolong Martinah.

Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 20. 05 WIB maka tidak ada petugas dari Polisi Lalu Lintas yang berjaga dan mengatur jalan. Salah seorang warga yang menyaksikan laka lantas tersebut menolong korban dan menelpon Bhabinkamtibmas setempat

¹⁹ Hasil wawancara dengan Tubagus, Kepala Desa Tanjung Sawit, pada tanggal 30 September 2019.

untuk membantu menyelesaikan perkara Laka Lantas tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh petugas Bhabinkamtibmas tersebut, beliau mengatakan bahwa:

Setelah petugas Bhabinkamtibmas setempat datang ke TKP bersama Kapolsek Tapung, kemudian petugas Bhabinkamtibmas menghubungi Unit Lantas terdekat untuk penanganan Laka Lantas lebih lanjut.²⁰

Ditempat yang terpisah sumber lain yang memegang komando tertinggi di Wilayah Hukum Polsek Tapung dalam wawancaranya dengan penulis, membenarkan PMH tersebut, beliau menyatakan bahwa:

Berdasarkan musyawarah antara beberapa pihak tersebut maka antara korban dan pelaku sepakat untuk berdamai, untungnya pelaku kooperatif dan menyadari kesalahannya. Pelaku memberikan sejumlah uang untuk biaya perawatan kaki korban yang lecet dan biaya perbaikan sepeda motor sejumlah Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus rupiah). Kemudian di buatlah kesepakatan perjanjian damai tertulis. Perjanjian damai melalui musyawarah beberapa pihak dan juga dimediasi oleh petugas Bhabinkamtibmas setempat merupakan tindakan yang benar dalam fungsi Bhabinkamtibmas yang mengutamakan mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa.²¹

Isi dari perjanjian perdamaian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan membuat perjanjian perdamaian dan saling memaafkan bagi para pihak.
- 2) Bahwa pihak pertama yaitu pihak pelaku (Heru) menyatakan telah membayar uang ganti rugi kepada korban akibat PMH yang dilakukannya, uang ganti rugi tersebut untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor pihak kedua yaitu korban (Martinah) dan uang berobat korban. Dicantumkan pula bahwa ganti rugi yang diberikan sejumlah Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus rupiah).
- 3) Bahwa pihak pertama berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melanggar rambu – rambu lalu lintas lagi, dan bila itu terjadi, maka pihak pertama siap menerima konsekuensi sesuatu ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang – undangan.
- 4) Kedua belah pihak sepakat bahwa setelah perjanjian perdamaian ditandatangani tidak akan melanjutkan perkara ini lagi dan saling menuntut baik secara pidana maupun perdata.
- 5) Kedua belah pihak telah sepakat tidak akan melanjutkan perkara ini melalui jalur litigasi (pengadilan)

²⁰ Hasil wawancara dengan Subian, Anggota Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Sawit pada Wilayah Hukum Polsek Tapung pada tanggal 13 September 2019.

²¹ Hasil wawancara dengan Kompol Sumarno, Kapolsek Tapung, pada tanggal 30 September 2019.

- 6) Apabila kedua belah pihak dan atau salah satu pihak tidak mentaati isi perjanjian perdamaian yang telah dibuat, maka kedua belah pihak dan atau salah satu pihak bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 7) Perjanjian tertulis tersebut juga ditandatangani oleh petugas Bhabinkamtibmas dan seorang warga yang berada di TKP sebagai saksi.

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT sebenarnya merupakan tindak pidana khusus karena diatur secara khusus dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada wilayah Hukum Polsek Tapung, KDRT terjadi di beberapa desa. Dari metode penelitian yang dilakukan penulis melalui teknik pengumpulan data dengan cara wawancara terstruktur, maka penulis memilih Desa Batu Gajah sebagai salah satu sampel. Menurut salah satu sumber data primer yang menerangkan bahwa:

KDRT yang dimaksud terjadi dalam biduk rumah tangga Warsono (23 tahun) dan istrinya yang bernama Aulia (21 tahun). Pasangan muda ini berkelahi dan terlibat adu mulut dikarenakan kecemburuan Warsono terhadap istrinya yang berlebihan. Warsono menuduh Aulia telah berselingkuh, dan Aulia menyangkalnya²²

Percekcokan tersebut tidak hanya berhenti disitu, sumber data primer lain yang merupakan seorang Tokoh Adat Desa Batu Gajah menambahkan bahwa:

karena Aulia yang terus menyangkal dan membantah tuduhan Warsono, maka Warsono naik pitam dan menampar pipi istrinya hingga lebam. Tetangga yang menyaksikan kejadian tersebut panik dan segera menghubungi petugas Bhabinkamtibmas, RT dan RW. Setibanya ditempat petugas Bhabinkamtibmas mencoba menghubungi pemuda, tokoh adat setempat dan pengurus LMD setempat. Sayangnya ketua RW, ketua pemuda dan pengurus LMD setempat tidak dapat hadir di TKP.²³

Setelah dilakukan assesmen dan berdasarkan bukti – bukti yang didapat oleh petugas Bhabinkamtibmas dirumah Warsono dan Aulia, ternyata memang benar Aulia tidak melakukan tuduhan perselingkuhan yang dituduhkan suaminya terhadap dirinya. Hal ini dipertegas dengan pernyataan petugas Bhabinkamtibmas setempat yang menyatakan bahwa:

Sang suami ini sudah salah paham, istrinya tidak pernah berbuat selingkuh tetapi sang suami tetap berikeras menuduh istrinya selingkuh. Berdasar keterangan warga sekitar rumah tinggal mereka yang petugas Bhabinkamtibmas himpun, sang istri ini sifatnya sangat baik, patuh dan setia kepada suaminya.

²² Hasil wawancara dengan Juned, Kepala Desa Batu Gajah, pada tanggal 11 Oktober 2019.

²³ Hasil wawancara dengan Datuk Suhaili (Datuk Muda), Tokoh Adat Desa Batu Gajah, pada tanggal 13 Oktober 2019.

Berdasarkan keterangan tersebut maka Petugas Bhabinkamtibmas melakukan reunifikasi dan musyawarah hingga akhirnya terciptalah kesepakatan damai antara suami istri tersebut dan dibuatlah perjanjian antara keduanya.²⁴

Berdasarkan informasi diatas, maka penulis memastikan kebenaran tentang adanya perjanjian damai yang telah dibuat para pihak, melalui wawancara secara terstruktur dengan Bhabinkamtib lainnya yang sama – sama bertugas di Desa Batu Gajah. Setelah bertemu dengan petugas Bhabinkamtibmas yang dimaksud, maka diperoleh pernyataan dari beliau bahwa:

Benar telah terjadi perdamaian, maka sesuai Tupoksinya kemudian petugas Bhabinkamtibmas menganjurkan keduanya membuat pernyataan dalam bentuk perjanjian damai secara tertulis yang ditanda tangani suami selaku pelaku dan istri selaku korban serta Tokoh Adat dan Bhabinkamtibmas selaku saksi.²⁵

Perjanjian perdamaian atas perbuatan pidana dalam bentuk KDRT tersebut memuat klausul – klausul sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan membuat perjanjian perdamaian dan saling memaafkan bagi para pihak.
- 2) Pihak pertama yaitu Warsono sebagai pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kepada Aulia sebagai pihak kedua/ korban, dan bila pelaku mengulanginya maka siap menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 3) Kedua belah pihak berjanji jika ada permasalahan rumah tangga dikemudian hari akan menyelesaikannya dengan baik – baik dan tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu kemandirian dan ketertiban warga sekitar.
- 4) Kedua belah pihak sepakat bahwa setelah perjanjian perdamaian ditandatangani tidak akan melanjutkan perkara ini lagi dan saling menuntut baik secara pidana maupun perdata.
- 5) Kedua belah pihak telah sepakat tidak akan melanjutkan perkara ini melalui jalur litigasi (pengadilan).

Dari ketiga kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kecamatan Tapung tersebut, dapat kita lihat bahwa tidak semua bentuk tindak pidana harus disesuaikan secara

²⁴ Hasil wawancara dengan Vedry , Bhabinkamtibmas Desa Batu Gajah pada Wilayah Hukum Polsek Taapung, pada tanggal 13 Oktober 2019.

²⁵ Hasil wawancara dengan M. Ridwan, Bhabinkamtibmas Desa Batu Gajah pada Wilayah Hukum Polsek Tapung, pada tanggal 13 Oktober 2019.

litigasi, karena pada dasarnya pengadilan merupakan upaya akhir untuk menyelesaikan segala bentuk kasus – kasus hukum. Tapi justru hal tersebut terkadang membuat pelakunya merasa bahwa hukum merupakan sesuatu yang bisa ditawar, oleh sebab itu tidak jarang perbuatan serupa dilakukan kembali oleh para pelaku dikemudian hari.

Pada dasarnya semua kasus PMH memang ada yang tidak boleh diselesaikan secara damai, terutama untuk PMH yang memenuhi unsur sebagai perkara pidana. Tapi mengapa petugas Bhabinkamtibmas Polsek Tapung berdasarkan contoh kasus diatas, selalu mengutamakan upaya perdamaian atas kasus – kasus PMH tersebut. Sudah jelas bahwa KDRT merupakan suatu tindak pidana, pencurian juga merupakan tindak pidana, pelanggaran lalu lintas juga merupakan perbuatan pidana. Untuk mengetahui jawabannya maka penulis memaparkannya dalam bentuk analisis kasus, dari ketiga kasus yang terjadi diatas.

a. Pencurian

Pencurian brondolan sawit yang dilakukan remaja usia tanggung bernama Davit dan Ilham di perkebunan sawit milik PT. RREE dengan taksiran kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu rupiah) yang diderita pihak perusahaan perkebunan sawit ini dapat kita kaji secara hukum sebagai berikut:

1) Pada Pasal 362 Jo. Pasal 364 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Disebutkan bahwa: perbuatan mengambil barang/sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dan jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam karena pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Lahirnya Perma ini merupakan bentuk nyata salah sifat hukum yang dituangkan dalam Teori Hukum Progresif oleh Satjipto Raharjo seorang pakar hukum pidana yang juga banyak meneliti, mengkritisi serta menerbitkan buku tentang Kepolisian. KUHP yang mengatur tentang batasan Tipiring tersebut tidak relevan lagi, karena hukum warisan Belanda yang sudah berabad umurnya tersebut perlu dilakukan pembenahan. Hal tersebut terlihat dari jumlah batasan tipiring dan nilai denda yang dikenakan. Oleh sebab itu dalam Perma ini diperbaharui bahwa batasan Tipiring atas pencurian adalah

dibawah nilai Rp. 2. 500. 000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga pelakunya tidak dapat ditahan.

- 3) Pasal 1368 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan ganti rugi itu, mengganti kerugian tersebut”

Maka dari ketiga regulasi yang mendasari tindakan Bhabinkamtibmas Polsek Tapung dalam penyelesaian perkara Tipiring dalam bentuk brondolan sawit ini dapat ditarik kesimpulan bahwa anjuran perdamaian yang oleh Bhabinkamtibmas ini adalah tindakan yang dapat dibenarkan secara hukum.

Walaupun unsur pidananya terpenuhi namun merupakan Tipiring yang tidak boleh dilakukan penahanan. Terkait dengan klausul ganti rugi terhadap korban dalam Pasal 1368 BW mengenai PMH, maka dikembalikan kepada para pihak demi kebaikan bersama. Kecuali jika dikemudian hari pelaku melakukan hal yang sama lagi di PT. RRME maka sesuai salah satu isi perjanjian yang dalam asas hukum *Pacta Sun Servanda* mengikat para pihak dan berlaku selayaknya undang – undang, maka pada klausul perjanjian yang berbunyi “pihak pertama berjanji tidak akan masuk ke area PT. RRME dan melakukan pencurian brondolan sawit yang jatuh ditanah lagi. Apabila pihak pertama mengulangi perbuatannya maka bersedia ditindak berdasarkan hukum yang berlaku.” Hukum yang berlaku adalah Pasal 1368 BW berupa ganti rugi dengan tujuan agar memberikan efek jera sebagai bentuk penanganan represif lanjutan dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Tapung.

b. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas

Kasus pelanggaran lalu lintas oleh Heru yang menyebabkan Laka Lantas dan merugikan Martinah sebagai korban, sebenarnya memenuhi unsur pidana. Tetapi kebijakan hukum dapat diterapkan dengan beberapa pertimbangan antara lain adalah dari seberapa parah dan seberapa besar kerugian yang diderita oleh korban serta pengakuan bersalah dan rasa tanggung jawab dari pelaku (itikad baik). Ditambah lagi prinsip Polmas yang lebih mengedepankan penyelesaian masalah dengan cara merangkul masyarakat dengan cara menggunakan jalur pengadilan sebagai upaya hukum terakhir dalam rangka melaksanakannya sebagai penegak hukum.

Dianalisis berdasarkan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dan taksiran kerugian baik secara fisik maupun materi, maka dapat kita kaji hukumnya sebagai berikut:

- 1) Pasal 106 ayat (4) Jo. Pasal 287 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka atas pelanggaran pasal tersebut Heru dapat dikenakan sanksi yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”
- 2) Pasal – Pasal terkait dengan Laka Lantas yang diatur dalam Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:
 - a) Pasal 231 ayat (1): “Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:
 - (1) Menghentikan kendaraan yang sedang dikemudikannya.
 - (2) Memberikan pertolongan kepada korban;
 - (3) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
 - (4) Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.
 - b) Pasal 229 Ayat (1): “Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - (1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan.
 - (2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang atau
 - (3) Kecelakaan Lalu Lintas berat.Ayat (2): “Kecelakaan Lalu Lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.”
 - c) Pasal 230: “Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - d) Pasal 234 ayat (1): “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Berdasarkan pasal – pasal tentang Lantas ini berlaku ketentuan walaupun pelaku telah membayar ganti rugi maka hal tersebut tidak dapat menggugurkan pidana. Namun hal ini dikembalikan kepada pihak korban, jika pihak korban menerima itikad baik atas kerugian

materiil dan luka lecet/ luka ringan yang dideritanya, maka besar kemungkinan perkara ini tidak sampai pada peradilan pidana.

- 3) Pasal 1368 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan ganti rugi itu, mengganti kerugian tersebut”

Dilihat dari sisi kemanusiaan bahwa pelaku telah membayarkan ganti rugi sebagai wujud ketaatan pada Pasal 231 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 1368 KUHPerdata. Kecuali jika dikemudian hari pelaku melakukan pelanggaran yang sama maka sesuai isi perjanjian perdamaian yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang menyebutkan bahwa pihak pertama berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melanggar rambu – rambu lalu lintas lagi, dan bila itu terjadi, maka pihak pertama siap menerima konsekuensi sesuatu ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang – undangan. Ini artinya dikemudian hari jika terjadi pengulangan PMH serupa berdasarkan ketentuan dalam UU LLAJ maka pelaku dapat dikenakan sanksi berupa denda dan atau pidana penjara, selai itu perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak berdasar asas Pacta Sun Servanda mengikat para pihak dan berlaku selayaknya undang – undang.

Maka dari regulasi – regulasi dan pertimbangan kemanusiaan yang mendasari tindakan Bhabinkamtibmas Polsek Tapung dalam penyelesaian perkara Laka Lantas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa anjuran perdamaian yang oleh Bhabinkamtibmas ini adalah tindakan yang dapat dibenarkan secara hukum.

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kasus KDRT yang dialami oleh Aulia yang telah menyebabkan pipinya lebam akibat tamparan yang dilakukan oleh suaminya yang bernama Warsono merupakan tindak pidana khusus, yang jika menurut hukum pidana yang berlaku jika terjadi perdamaian dan atau telah dibayarkan ganti rugi maka tidak akan menghapuskan pidananya.

Tetapi kebijakan hukum dapat diterapkan dengan beberapa pertimbangan antara lain adalah dari seberapa parah dan seberapa besar kerugian yang diderita oleh korban serta pengakuan bersalah dan rasa tanggung jawab dari pelaku (itikad baik). Ditambah lagi prinsip Polmas yang lebih mengedepankan penyelesaian masalah dengan cara merangkul masyarakat dengan cara menggunakan jalur pengadilan sebagai upaya hukum terakhir dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum.

Atas kasus hukum dengan bentuk kerugian yang diderita korbannya tersebut maka dapat kita analisis secara hukum sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh atau luka berat. Maka pasal inilah yang dapat menjerat Warsono.
- 2) Pasal 1368 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan ganti rugi itu, mengganti kerugian tersebut”

Pada kasus KDRT seperti inilah sebenarnya fungsi Bhabinkamtibmas sangat diperlukan. Selain pelaksanaan fungsi Kamtibmas saat konflik, maka penanganan pasca konflik pun sangat diperlukan dengan melakukan kegiatan sambang warga dan terus menanamkan sebuah nasehat mengenai perlunya membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menyenangkan bagi keluarga.

Berdasarkan dari regulasi – regulasi yang mendasari tindakan Bhabinkamtibmas Polsek Tapung dalam penyelesaian perkara KDRT ini dapat ditarik kesimpulan bahwa anjuran perdamaian yang oleh Bhabinkamtibmas ini adalah tindakan yang dapat dibenarkan secara hukum. Dengan catatan jika perbuatan serupa dilakukan atau diulangi lagi dikemudian hari maka sesuai klausul dalam perjanjian perdamaian yang telah disepakati para pihak, maka atas janji pelaku untuk tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kepada korban, pelaku siap menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pada dasarnya tujuan dibentuknya Bhabinkamtibmas sesuai dengan Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat adalah untuk mengedepankan pola penanganan permasalahan Kamtibmas pada tingkat dasar dengan cara musyawarah untuk mufakat sebagai salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama. Dimana tujuan dari penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) adalah agar lebih efektif dan sebagai upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum. Jadi bisa disimpulkan bahwa penanganan masalah oleh

Bhabinkamtibmas Polsek tapung atas kasus – kasus PMH tersebut sesuai regulasi, walaupun belum menampakkan hasil capaian yang maksimal terhadap pelaksanaan Tupoksi petugas Bhabinkamtibmas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis menarik kesimpulan menggunakan metode secara induktif. Metode secara induktif adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari yang sifatnya khusus ke yang sifatnya umum. Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta wewenang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kepolisian Sektor Tapung belum mencapai hasil yang maksimal hal ini terlihat dari tingginya angka – angka PMH pada bidang keamanan dan ketertiban di wilayah hukum sektor Tapung yang beberapa kasus terpenuhi unsur pidananya dan dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana yang dilakukan oleh masyarakat Tapung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Tabah, *Reformasi Kepolisian (Pakar menjawab: Polri harus otonom dan terpisah dari ABRI)*. Semarang: CV Sahabat, 1998
- I Nyoman Nuurjaya S.H., Antara Polisi, Masyarakat Dan Pembinaan Kamtibmas, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Volume 12, No.3, Mei 1982
- LaRouche, *Apakah Demokrasi itu Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin*, terj.Sesko TNI, Washinton DC: EIR News Service, Inc,1994
- Pramono Mulyono, *Materi Kuliah Praktek Latihan Kemahiran Hukum Pidana* Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2008
- Priyatno, Dwijaya, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007
- Purnama, I Ketut Adi, *Hukum Kepolisian, Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Ridwan Setiawan Daradjat, Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Oleh Polisi Resort Kota Dalam Membentuk Sikap Masyarakat, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 3, No.2, Desember 2015

- Sarcripto Raharjo. 10 Februari 1998. *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. Makalah disajikan dalam symposium nasional ilmu hukum “*Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia*”, disampaikan dalam rangka disnatis fakultas hukum Undip Semarang
- Singgih Miharsi Pamungkas, Peran Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen), *Universitas Diponegoro Semarang* , 2018
- Subdit Binpolmas Baharkam Polri, *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*, Jakarta: Ditbinmas Baharkam Polri, 2014.
- Tabah, *Polisi Budaya Dan Politik*, Semarang: CV Sahabat, , 1996
- Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta, 2009
- Humas Polri, Tugas dan Fungsi Polri (Online), <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.
- ICPCS, *Community Policing Kamtibmas Online*, <https://polmas.wordpress.com/2014/10/27/pemolisian-komuniti-community-policing-dalam-menciptakan-kamtibmas/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.